

Judul : Pemerintah-DPR Sepakati RAPBN 2019
Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Pemerintah-DPR Sepakati RAPBN 2019

Penerimaan negara tahun ini sedikit lebih tinggi ketimbang yang sudah direncanakan, yaitu mencapai Rp1.903 triliun dari rencana awal sebesar Rp1.894 triliun.

TESA OKTIANA SURBAKTI
Tesa@mediaindonesia.com

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,2%-5,6%. Hal itu disepakati dalam rapat kerja (raker) antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan di ruang rapat Banggar, kemarin.

Rapat yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Perry Warjiyo, itu membahas penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Hasil kesepakatan pada panitia kerja (panja) ialah mengenai asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan, serta pertumbuhan ekonomi 2019 yang diperkirakan berada di kisaran 5,2%-5,6% (lengkapnya lihat grafik).

Rapat juga menyetujui hasil laporan panja untuk dibawa ke Rapat Paripurna, hari ini.

"Ini suatu awal yang bagus dalam proses kita menyusun RAPBN 2019 sehingga kita bisa mendesain sebaik mungkin

agar bisa menjadi instrumen yang menjaga kita semua dalam menghadapi ketidakpastian," tukas Menkeu.

Untuk tahun ini, Menkeu memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2018 diperkirakan 5,1%. Angka ini, kata dia, didapat berdasarkan perkiraan keseluruhan penerimaan negara pada tahun ini yang sedikit lebih tinggi ketimbang yang sudah direncanakan yaitu mencapai Rp1.903 triliun dari

rencana awal Rp1.894 triliun.

Oleh karena itu, dia juga memastikan postur APBN 2018 masih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara sehingga tidak membutuhkan APBN Perubahan.

"Dengan penerimaan dan belanja negara tetap sesuai, kami memutuskan ini telah mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan perekonomian negara pada 2018," katanya.

Neraca surplus

Sementara itu, saat ditemui se usai rapat, Gubernur BI

Perry Warjiyo mengatakan Bank Sentral memproyeksikan tingkat neraca perdagangan pada Juni 2018 surplus US\$1 miliar. Angka itu lebih tinggi bila dibanding perkiraan sebelumnya sebesar US\$900 juta. Berapa pastinya neraca perdagangan biasanya diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan Juli.

"Dengan data-data terakhir neraca perdagangan Juni itu akan lebih tinggi daripada yang kita perkirakan sebelumnya, yang semula US\$900 juta, ini bisa lebih tinggi jadi US\$1 miliar," ujar Perry.

Menurut dia, neraca perdagangan yang surplus memberikan dampak positif bagi tingkat defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) di sepanjang tahun ini.

"Dengan perhitungan itu tentu saja nanti kita lihat, kita kalkulasi berapa CAD di kuartal II. Tapi, sudah jauh-jauh hari kita ingatkan CAD secara musiman di kuartal II lebih tinggi," jelas dia.

Perry mengungkapkan, sampai akhir tahun ini defisit transaksi berjalan tidak akan melebihi 2,5 % dari produk domestik bruto (PDB).

Oleh karena itu, kata dia, Bank Sentral tidak merisaukan tingkat CAD di kuartal II tahun ini karena masih bisa membaik di akhir tahun. (E-2)

Asumsi Dasar Makro RAPBN 2019

• Pertumbuhan ekonomi 2019	5,2%-5,6%
• Laju inflasi	2,5%-4,5%
• Nilai tukar rupiah	Rp13.700-Rp14.000
• Tingkat bunga SPN-3 bulan	4,6%-5,2%
• Harga minyak mentah	US\$60-US\$70 per barel
• Lifting minyak dan gas bumi	1.932-2.105 ribu barel per hari
• Lifting minyak bumi	722-805 ribu barel per hari
• Lifting gas bumi	1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari

Sumber: Kementerian Keuangan RI